



Wandira Larasati/SMERU

MENUJU AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Wandira Larasati, Abdullah Faqih, M. Sulton Mawardi

SOROTAN

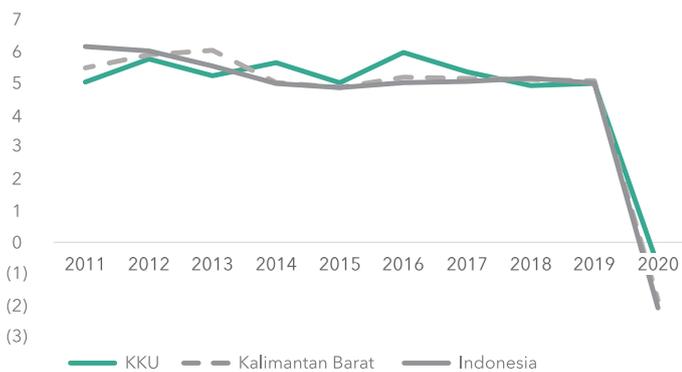
- Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang lumayan tinggi belum cukup untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di kabupaten ini. Skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) KKU yang relatif rendah menempatkan KKU pada peringkat ke-9 di antara 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.
- Rendahnya inklusivitas pembangunan di KKU disebabkan oleh infrastruktur pendukung perekonomian—terutama jalan—yang belum memadai dan tingkat pendidikan yang rendah. Dengan keterbatasan ini, produktivitas, inovasi, dan adopsi teknologi sangat minim sehingga imbal hasil bagi masyarakat juga rendah. Sebagai akibatnya, kualitas ketenagakerjaan masih rendah dan tingkat kemiskinan masih tinggi.
- Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan angka lama sekolah, dan akselerasi peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian, khususnya kondisi mantap jalan¹, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif di KKU.

¹ Kategori jalan dengan kondisi baik dan sedang (BPS, 2019).

PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI, TETAPI IPEI RENDAH

Pertumbuhan ekonomi di KKU terhitung cukup tinggi, yaitu mencapai angka rata-rata 5,34% selama periode 2011–2019, dan turun hanya -0,74% pada 2020 saat terjadi pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19). Penurunan angka pertumbuhan ini tidak sebesar penurunan pertumbuhan ekonomi nasional (2,07%) ataupun Provinsi Kalimantan Barat (1,82%) (Gambar 1). Namun, skor IPEI KKU pada 2021 masih relatif rendah, yaitu sebesar 5,1, dan tertinggal dari skor rata-rata nasional (6,0) ataupun provinsi (5,4) (Gambar 2). Skor IPEI menggambarkan tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi yang seyogianya diiringi dengan angka kemiskinan dan ketimpangan yang rendah, serta akses terhadap kesempatan ekonomi yang luas. Skor IPEI yang relatif rendah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi, meskipun relatif tinggi, belum tentu inklusif karena manfaatnya tidak dinikmati secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

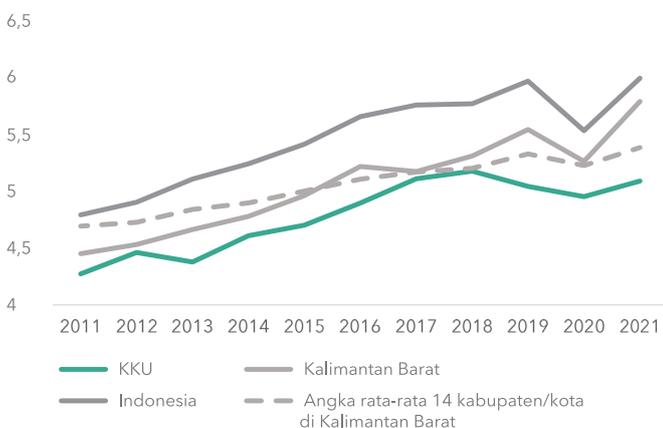
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi KKU, Kalimantan Barat, dan Indonesia (%)



Sumber: Data BPS², BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS KKU, 2011–2020.

Keterangan: Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

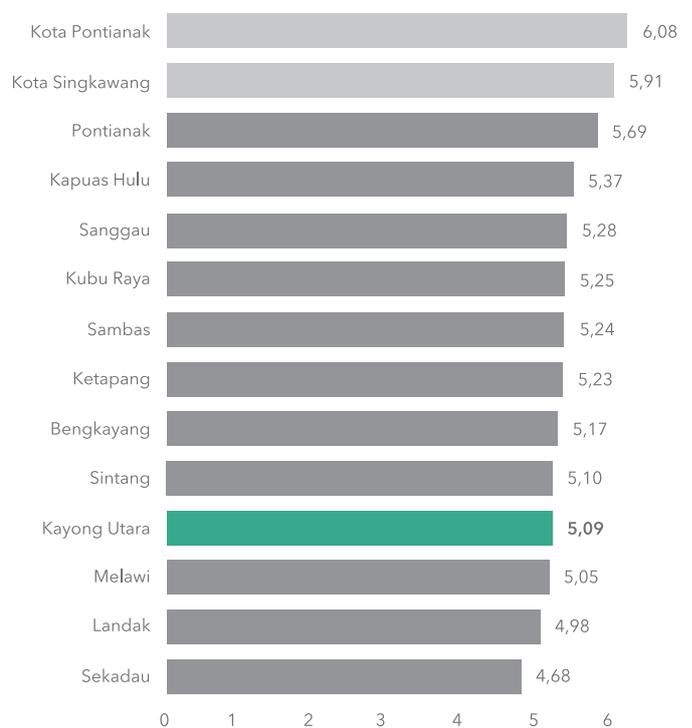
Gambar 2. IPEI Tahun 2011–2021



Sumber: Bappenas³, 2021.

Menurut indikator IPEI tertentu, KKU sudah menunjukkan performa yang sangat baik dalam beberapa aspek. Contohnya adalah persentase kepemilikan jaminan kesehatan di KKU yang sudah mencapai 100%. Hal itu berarti bahwa seluruh masyarakat KKU telah memiliki jaminan untuk mengakses layanan kesehatan. Selain itu, angka pengangguran hanya sebesar 3,8%, lebih rendah daripada angka nasional (6,5%) dan provinsi (5,8%) (data BPS, BPS Provinsi Kalimantan Barat, dan BPS KKU, 2021). Namun, capaian indikator yang baik tersebut belum mampu mengangkat tingkat inklusivitas pembangunan ekonomi di KKU. Skor IPEI KKU yang relatif rendah menempatkan KKU pada peringkat ke-9 di antara 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat⁴ (Gambar 3).

Gambar 3. Skor IPEI Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2021



Sumber: Bappenas, 2021.

Dengan melihat potensi sumber daya alam yang melimpah di KKU, kami melakukan studi dengan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya skor IPEI KKU jika dibandingkan dengan angka nasional dan provinsi. Dalam studi ini, peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap sejumlah indikator IPEI serta melakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*), wawancara mendalam, dan wawancara kelompok dengan sejumlah pemangku kepentingan terpilih di KKU.⁵

² Badan Pusat Statistik.

³ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁴ Kabupaten di Kalimantan Barat dengan peringkat skor IPEI dari yang tertinggi hingga terendah adalah Mempawah, Kapuas Hulu, Sanggau, Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Bengkayang, Sintang, Kayong Utara, Melawi, Landak, dan Sekadau. Analisis ini tidak mencakup Kota Pontianak dan Kota Singkawang karena hanya membandingkan wilayah administratif kabupaten.

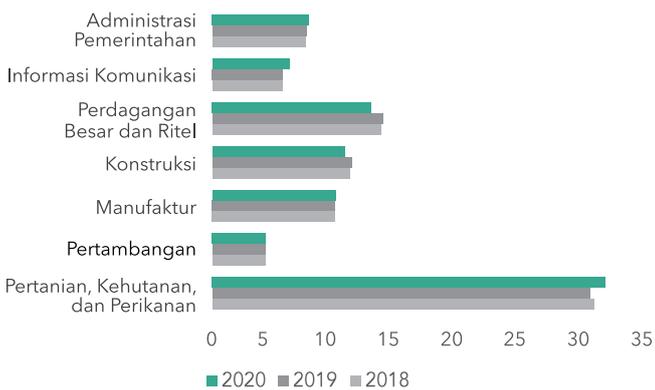
⁵ Studi ini dilaksanakan atas kerja sama The SMERU Research Institute dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KKU dan didukung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Ford Foundation.

ISU UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KKU

Sektor primer menjadi tumpuan perekonomian, meski pertumbuhan dan perkembangannya belum optimal.

Masyarakat KKU sangat bergantung pada sektor primer⁶ yang merupakan sektor dengan pangsa (*share*) tertinggi terhadap PDRB di KKU. Selama satu dekade terakhir, sektor-sektor primer di KKU secara rata-rata memiliki pangsa sebesar 31,9% terhadap keseluruhan PDRB-nya (Gambar 4). Selain itu, pada 2020, sektor primer mampu menyerap 49,6% dari jumlah pekerja di KKU (data Sakernas⁷, 2020). Hal ini berarti bahwa hampir separuh dari jumlah orang yang bekerja di KKU adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer (BPS KKU, 2021). Produksi sektor primer di KKU mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, kelapa sawit, serta hasil perikanan tangkap. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi di KKU tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan sektor primer.

Gambar 4. Pangsa Berbagai Sektor terhadap PDRB KKU Tahun 2018-2020



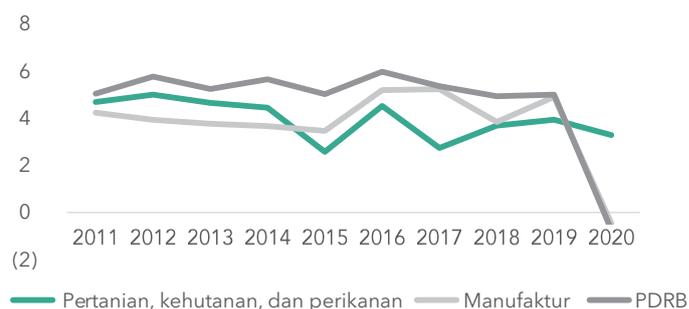
Sumber: Data BPS KKU, 2018-2020.

Meskipun sektor primer memiliki pangsa terbesar terhadap PDRB, pertumbuhan rata-ratanya dalam satu dekade terakhir mengalami stagnasi, yaitu sekitar 3,96%, sementara pertumbuhan ekonomi rata-rata di KKU selama periode yang sama mencapai 4,73% (Gambar 5). Hal itu disebabkan oleh, antara lain, produktivitas sektor primer yang belum optimal akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengelola sektor ini. Mereka masih menggunakan alat dan teknologi sederhana, kurang mampu berinovasi, serta memiliki pengetahuan terbatas dalam memproduksi dan mengelola hasil dari sektor primer.

Rata-rata lama sekolah (RLS) di KKU cukup rendah, yakni sekitar 6,9 tahun (paling rendah di antara semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat). Masyarakat yang bekerja di sektor primer memiliki RLS yang bahkan lebih

rendah, yakni hanya 5,3 tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata masyarakat yang bekerja di sektor primer adalah mereka yang belum menamatkan pendidikan sekolah dasar (SD). Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika produktivitas di sektor primer cenderung rendah dan berakibat pada rendahnya imbal balik di sektor ini. Pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat KKU adalah 1,146 juta rupiah per bulan (Gambar 6). Sementara itu, masyarakat yang bekerja di sektor primer memiliki pengeluaran rata-rata lebih rendah, yakni 1,060 juta rupiah per bulan (data Susenas⁸, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di KKU relatif tinggi (9,3% pada 2021) dan indikator pembangunan manusianya relatif masih tertinggal (dengan skor Indeks Pembangunan Manusia/IPM sebesar 62,90).

Gambar 5. Pertumbuhan PDRB KKU menurut Sektor (%)



Sumber: Data Susenas, 2021.

Produktivitas sektor pertanian relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor manufaktur (Lewis dalam Martin dan Mitra, 2001). Beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa sektor pertanian yang besar menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi (Sachs dan Warner, 1995; Rodríguez dan Rodrik, 2000). Akan tetapi, KKU masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan belum menunjukkan inisiatif untuk mengembangkan sektor manufaktur. Sebagian besar hasil sektor primer, seperti kelapa sawit, dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perusahaan. Hilirisasi produk pertanian, perkebunan, dan perikanan masih bersifat industri rumahan, belum masif, serta belum menjadi prioritas pembangunan di KKU.

Gambar 6. Pengeluaran Per Kapita (dalam Rupiah) dan RLS menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2021



Sumber: Data Susenas, 2021 (diolah).

⁶ Sektor primer yang dimaksud dalam tulisan ini mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara sektor pertambangan dan penggalian dikecualikan karena pangsa sektor ini terhadap PDRB KKU pada 2021 relatif rendah, yakni sekitar 4,2%.

⁷ Survei Angkatan Kerja Nasional.

⁸ Survei Sosial-Ekonomi Nasional.

Sebagai akibatnya, pangsa sektor industri pengolahan di KKU masih berada pada angka 9%–10% dalam satu dekade terakhir dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, cukup jauh di bawah angka nasional dan provinsi pada 2021, yaitu masing-masing 19,3% dan 16,5%. Industri pengolahan di KKU didominasi oleh industri berskala kecil dan menengah (IKM). Terdapat 1.764 IKM yang bergerak di industri pangan, kerajinan, sandang, kimia, dan logam serta menyerap sekitar 4.383 tenaga kerja (BPS KKU, 2021) atau sekitar 4,8% dari jumlah tenaga kerja di KKU (data Sakernas, 2021). Sejak 2016, sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi daripada sektor primer, kecuali pada 2020 saat pandemi. Hal ini menunjukkan besarnya potensi pengembangan industri pengolahan di KKU melalui pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Gambar 7).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018–2023, pertumbuhan dan pangsa sektor industri pengolahan tidak menjadi target (*outcome*) capaian kinerja pemerintah daerah. Target pembangunan terkait industri ini dalam RPJMD masih berupa keluaran (*output*), seperti jumlah IKM yang menerima bantuan, pelatihan, dan izin usaha, dengan angka target yang bahkan masih rendah. Misalnya, pada 2023, Pemerintah KKU hanya menargetkan 21 IKM yang mendapatkan bantuan dan 75 IKM yang memperoleh pelatihan peningkatan keterampilan mengemas produk (RPJMD KKU 2018–2023). Angka target yang rendah ini disebabkan oleh porsi anggaran untuk pengembangan sektor UMKM yang relatif terbatas. Sebagai contoh, anggaran untuk pelatihan bagi pelaku UMKM hanya sebesar 67 juta rupiah pada 2023 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD KKU 2022). Sementara itu, belum terlihat adanya minat investor untuk membangun industri berskala besar di KKU.

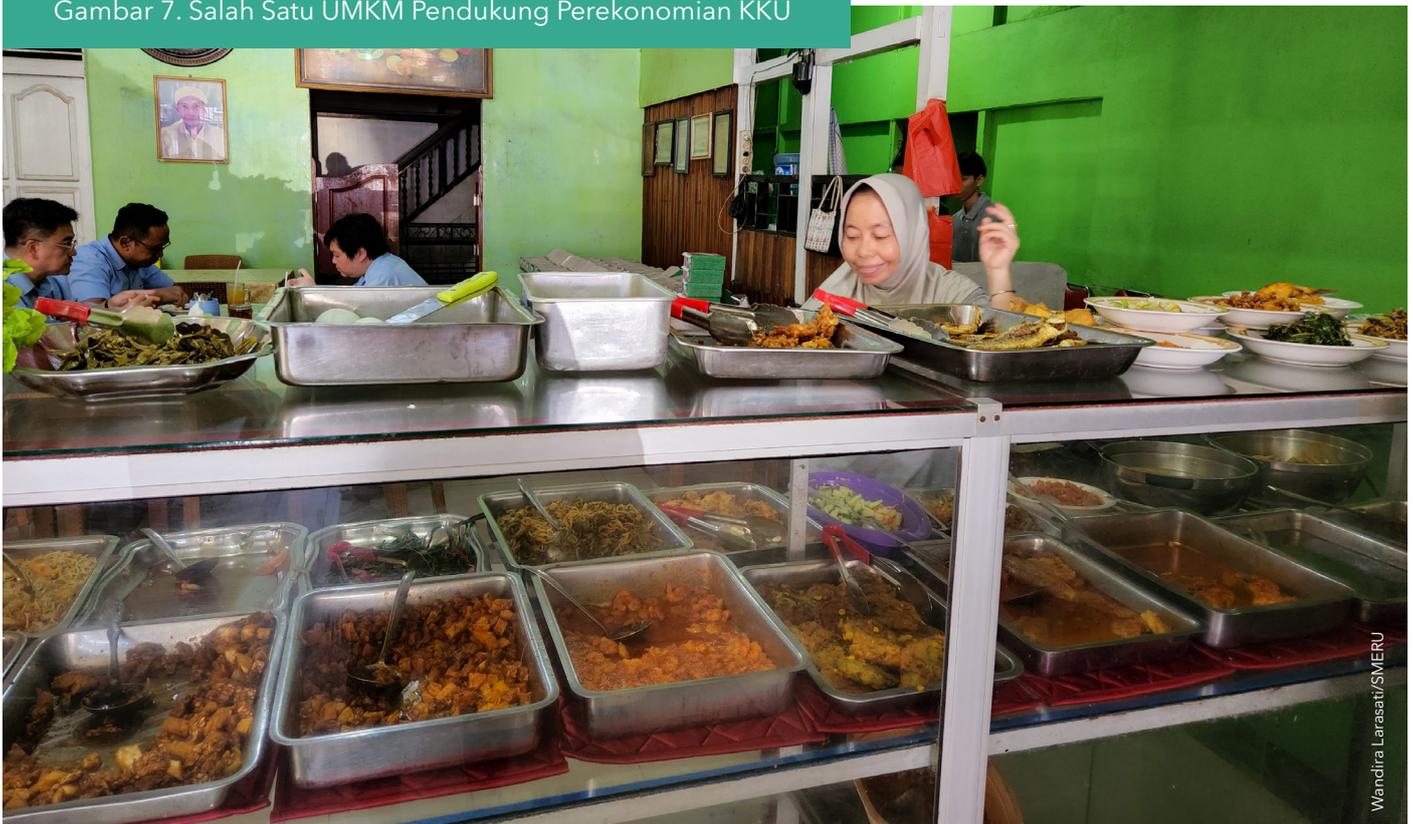
Buruknya infrastruktur jalan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian, seperti jalan, listrik, dan sarana konektivitas, belum memadai (Gambar 8). Hal ini menjadi penyebab terhambatnya pengembangan dan pertumbuhan industri pengolahan di KKU. Infrastruktur jalan merupakan prasyarat utama bagi pengembangan industri pengolahan terutama karena infrastruktur ini dapat memastikan kelancaran arus pasokan bahan baku dan distribusi produk-produk hasil olahan industri (Jackson dan Jabbie, 2021). Belum terpenuhinya prasyarat utama tersebut menyebabkan minat investor untuk berinvestasi dan membangun industri pengolahan menjadi rendah. Sebagai akibatnya, sampai saat ini, KKU belum memiliki satu pun industri besar.

KKU memiliki panjang jalan 300,59 km dengan kondisi mantap sepanjang 179,86 km atau 59,8%. Namun, apabila dibandingkan dengan luas wilayah KKU yang mencapai 4.568 km², kondisi tersebut masih belum memadai karena rasio mantap jalan terhadap luas wilayah KKU berada pada angka 0,04, sementara rasio mantap jalan tingkat nasional adalah sebesar 0,20. Persentase mantap jalan nasional sudah berada pada angka 91,3% sehingga KKU memerlukan sekitar 95 km jalan mantap tambahan agar dapat menyamai persentase mantap jalan nasional.

Terdapat dua faktor utama penyebab belum memadainya rasio panjang jalan mantap terhadap luas wilayah di KKU. **Pertama**, pembangunan jalan dengan kondisi mantap lambat karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belum kuat. Dalam dokumen RPJMD,

Gambar 7. Salah Satu UMKM Pendukung Perekonomian KKU



Gambar 8. Kondisi Ruas Jalan yang Perlu Diperbaiki



alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan adalah sekitar 45 miliar rupiah setiap tahun selama periode 2019–2023. Menurut keterangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KKU, panjang jalan di KKU yang perlu diperbaiki menjadi jalan mantap adalah sekitar 122 km, sementara kebutuhan anggaran untuk membangun 1 km panjang jalan adalah sekitar 2,5 miliar rupiah. Hal ini berarti, dengan skema alokasi yang ada sekarang, perlu waktu tujuh tahun untuk memaksimalkan persentase mantap jalan di KKU; hal itu belum memperhitungkan penambahan panjang jalan baru⁹ dan anggaran pemeliharaan jalan berkala.

Pada 2020, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per kapita di KKU cukup tinggi (Rp5.847.311), jika dibandingkan dengan angka APBD per kapita di daerah lain dengan karakteristik perekonomian yang sama, yakni Ketapang (3,9 juta rupiah), Melawi (4,3 juta rupiah), dan Sambas (2,6 juta rupiah) (BPS KKU, 2021; Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2020). Pada tahun tersebut, KKU memiliki selisih pendapatan dan belanja anggaran sekitar 42 miliar rupiah atau penyerapan anggaran 94,6%. Sementara itu, pada 2021, penyerapan anggaran oleh Dinas PUTR hanya sebesar 88,03% (Pemerintah KKU, 2022). Oleh karena itu, sangat krusial bagi KKU untuk memiliki perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih matang—prioritas pembangunan dengan daya ungkit yang besar mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai.

Kedua, wilayah KKU dikelilingi oleh kawasan konservasi dengan luas 108.043,90 hektare, yaitu Taman Nasional Gunung Palung (TNGP), dan bersebelahan dengan lima kecamatan, yaitu Kecamatan Matan Hilir, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hilir, Kecamatan Sungai Laur, dan Kecamatan Sandai (Dirjen KSDAE KLHK, 2019). Upaya pembangunan jalan di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan TNGP menghadapi kendala birokrasi dan perizinan dengan otoritas pengelola, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sejauh ini, pemerintah kabupaten belum memiliki catatan mengenai keberhasilan bernegosiasi dengan pihak pengelola TNGP untuk membangun jalan di wilayah tersebut.

Selain menghambat proses hilirisasi dan peningkatan produktivitas, infrastruktur jalan yang tidak memadai memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama dalam memperoleh akses listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai saat ini, masih ada 12,6% penduduk KKU yang belum menikmati akses listrik PLN (Gambar 9). Kondisi geografis KKU yang terpisah antara wilayah kepulauan dan daratan serta infrastruktur jalan yang belum memadai menyulitkan PLN untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Tambahan pula, persebaran penduduk di wilayah kepulauan cenderung terpencar sehingga bagi PLN hal ini tidak menjanjikan dari segi prospek bisnis. Untuk memenuhi kebutuhannya akan akses listrik, penduduk tanpa akses listrik PLN menempuh sejumlah strategi, seperti menyambungkan kabel listrik ke meteran listrik milik tetangga, memanfaatkan tenaga mesin diesel dengan pasokan listrik hanya sekitar 12 jam per hari, dan memanfaatkan lampu minyak tanah.

⁹ Pada 2022, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan dengan kondisi mantap di KKU adalah 87 miliar rupiah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPd 2022. Hal tersebut berbeda dengan yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan skema tersebut, waktu yang diperlukan untuk mencapai persentase mantap jalan yang maksimal di KKU adalah empat tahun.

Gambar 9. Beberapa Rumah Tangga tanpa Akses Listrik



Infrastruktur jalan sangat vital bagi pembangunan sosial-ekonomi di suatu wilayah karena dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Aschauer, 1989; Agenor dan Moreno-Dodson, 2006; Grundey, 2008). Dengan demikian, infrastruktur jalan yang tidak memadai akan menimbulkan sejumlah efek domino, seperti menyulitkan pembangunan sarana komunikasi serta akses masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lembaga keuangan. Pada 2021, angka harapan lama sekolah (AHLS) di KKU adalah 11,84 tahun; hal ini berarti bahwa seorang anak yang dilahirkan di KKU hari ini diproyeksikan tidak akan menamatkan pendidikan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu, angka imunisasi dasar anak bawah lima tahun (balita) juga termasuk rendah dengan persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) hanya 38% pada 2021 (data Susenas, 2021). Dinas Kesehatan KKU memiliki data berbeda dan menyatakan bahwa angka imunisasi pada 2021 sudah mencapai 62,91%. Namun, angka tersebut tetap masih relatif rendah mengingat target pemerintah untuk angka balita dengan IDL adalah 79,1% (Kementerian Kesehatan, 2021), sementara untuk mencapai *herd immunity* (kekebalan kelompok), cakupan imunisasi seharusnya mencapai 95%. Cakupan imunisasi yang tinggi dan kekebalan kelompok sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang tangguh. Kualitas sumber daya manusia di KKU yang relatif rendah inilah yang membuat pembangunan ekonomi di KKU belum inklusif.

AHLS di KKU yang rendah disebabkan oleh, antara lain, sarana pendidikan serta infrastruktur jalan yang masih belum memadai. Pembangunan sarana pendidikan perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana konektivitas yang layak agar hasilnya optimal. Minat bersekolah anak-anak di KKU, terutama yang tinggal di wilayah kepulauan, juga tergolong rendah.

Sebagian masyarakat di wilayah kepulauan lebih memilih menyekolahkan anak mereka di Kepulauan Bangka Belitung karena lokasinya lebih mudah dijangkau dan kualitasnya lebih baik, sementara lokasi sekolah yang dibangun di KKU jauh dari tempat tinggal mereka. Sebagian lainnya merasa tidak perlu menyekolahkan anaknya karena tanpa sekolah pun, mereka bisa mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan dari memanfaatkan potensi sumber daya alam di sekitarnya. Misalnya, mereka dapat menangkap dan menjual ikan, meski dengan imbal hasil yang tergolong rendah apabila dibandingkan dengan imbal hasil yang diperoleh tenaga kerja berpendidikan.

“Anak-anak di sini mau kerja apa saja bisa, *ndak* harus sekolah tinggi. Anak SD *habis* pulang sekolah bisa kerja bantu-bantu angkut ikan bisa dapat uang yang lumayan untuk jajan. Di kebun sawit juga *ndak* perlu sekolah tinggi-tinggi sudah bisa kerja *ngangkut* buah sawit. (Peserta FGD, perempuan, 17 Maret 2022)

Dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan di KKU, belum ada terobosan maupun program yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di KKU. Mereka juga mengungkapkan bahwa cukup sering terjadi perubahan struktur birokratis yang menyebabkan kurang optimalnya program peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini dijalankan.

Pembangunan ekonomi inklusif belum diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dari ketujuh indikator prioritas pembangunan di KKKU, pertumbuhan ekonomi masih menjadi target utama capaian pembangunan, sementara inklusivitas pertumbuhan ekonomi belum menjadi tujuan utama pembangunan. Dari 21 indikator IPEI, hanya 6 indikator termuat dalam RPJMD KKKU 2019–2023, yaitu indikator kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kesetaraan gender, peningkatan infrastruktur ekonomi, rumah tangga dengan jamban sendiri, dan rumah tangga dengan akses air bersih. Aspek peningkatan hilirisasi, kualitas ketenagakerjaan, serta keuangan inklusif belum menjadi target capaian pembangunan di KKKU.

RPJMD KKKU 2019–2023 belum memuat target pertumbuhan ekonomi setiap sektor ataupun target pendapatan yang berpeluang diterima daerah. Perencanaan pembangunan yang belum matang juga tampak dari belum adanya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam memetakan potensi ekonomi unggulan daerah, padahal hasil pemetaan tersebut berperan penting sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor potensial serta melakukan hilirisasi produksi sektor prioritas.

Perencanaan pembangunan yang belum inklusif dan komprehensif membuat OPD teknis mengalami kesulitan untuk menerjemahkan visi dan arah pembangunan ekonomi KKKU. Sebagai akibatnya, OPD memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai sektor pendukung perekonomian yang perlu dijadikan prioritas. Sebagai ilustrasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) KKKU telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) yang memuat identifikasi komoditas unggulan daerah yang perlu diprioritaskan, yaitu hasil perikanan, hasil hutan, dan tanaman hortikultura. Berbeda dengan DPPKUKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) KKKU berpandangan bahwa beras dan kopi adalah komoditas potensial yang perlu dijadikan prioritas. Ketakharmonisan dalam memetakan komoditas unggulan daerah menyebabkan, antara lain, pembangunan ekonomi KKKU kurang terarah.

KESIMPULAN

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa, meskipun pertumbuhan ekonomi di KKKU relatif tinggi, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kabupaten ini masih belum inklusif. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut.

a) Infrastruktur pendukung perekonomian, yaitu jalan dengan kondisi mantap, belum memadai. Hal tersebut menghambat proses hilirisasi serta pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan konektivitas di KKKU. Belum adanya hilirisasi menyebabkan nilai tambah perekonomian masih rendah yang membuat pertumbuhan ekonomi belum optimal. Sementara itu,

terhambatnya proses pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan konektivitas di KKKU menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di KKKU.

- b) Kualitas sumber daya manusia yang rendah menyebabkan terbatasnya pertumbuhan sektor primer yang menjadi tumpuan perekonomian KKKU. Tingkat pendidikan yang rendah membuat produktivitas dan inovasi atau adopsi teknologi di sektor primer sangat minim sehingga imbal hasil bagi masyarakat juga rendah. Sebagai akibatnya, kualitas ketenagakerjaan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi.
- c) Arah kebijakan pembangunan di KKKU belum sepenuhnya mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif. Fokus pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas sektor primer belum disertai dengan upaya hilirisasi yang masif ataupun pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM. Selain itu, Pemerintah KKKU belum memiliki peta jalan pembangunan dan peta potensi daerah yang tersinergi antareksekutif tingkat daerah. Hal itu menyebabkan target capaian dan arah kebijakan yang dirumuskan pemerintah daerah kurang terkoordinasi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil analisis dan kesimpulan di atas menegaskan bahwa diperlukan upaya serius dan terobosan ataupun program yang lebih inovatif untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan ekonomi di KKKU. Secara umum, diperlukan upaya jangka menengah dan jangka panjang untuk dapat mencapai pembangunan ekonomi inklusif di KKKU. Namun, Pemerintah KKKU juga dapat melakukan beberapa hal dalam jangka pendek sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pengurangan kemiskinan serta perluasan akses dan kesempatan ekonomi.

Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dengan meningkatkan angka lama sekolah, perlu menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan seharusnya tidak terbatas pada penyediaan fasilitas fisik pendidikan, seperti bangunan sekolah. Pemerintah KKKU perlu juga memastikan bahwa ketika fasilitas fisik telah tersedia, anak-anak di KKKU dapat mengikuti pendidikan. Hal itu dapat dicapai dengan, antara lain, mendorong sistem pendidikan menengah ke atas yang berbasis asrama, khususnya untuk masyarakat di wilayah pesisir. Selain itu, pemerintah perlu mengoptimalkan skema Kartu Indonesia Pintar yang memberikan jaminan pendidikan bebas biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Dalam jangka menengah dan panjang, Pemerintah KKKU perlu melakukan akselerasi peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian, yakni jalan, listrik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Di kabupaten mana pun, termasuk KKKU, infrastruktur pendukung perekonomian berperan sebagai indikator yang memiliki

daya ungkit besar. Sebagai contoh, infrastruktur jalan dapat meningkatkan akses terhadap pendidikan dan berpeluang meningkatkan minat investor untuk masuk ke KKU. Dengan demikian, infrastruktur jalan perlu menjadi target pembangunan prioritas di KKU khususnya dari sisi anggaran.

Dalam jangka pendek, Pemerintah KKU dapat melakukan beberapa hal berikut: (i) membuat peta potensi industri rumah tangga di setiap kecamatan, (ii) membuat terobosan ataupun program pelatihan yang memastikan peningkatan kapasitas peserta sasaran secara berkelanjutan, (iii) menciptakan inovasi pendanaan program tersebut melalui kemitraan dengan pihak swasta, dan (iv) mengadopsi konsep pembangunan ekonomi inklusif sebagai arah kebijakan pembangunan di KKU.

Peta potensi industri rumah tangga dapat menjadi basis pengembangan sektor UMKM sebagai bagian dari upaya hilirisasi. Sementara itu, program pelatihan atau peningkatan kapasitas para petani, nelayan, atau pelaku UMKM perlu didesain agar berkelanjutan. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menyusun program pelatihan bagi pelatih (*training of trainers/ToT*); dalam program ToT, peserta sasaran yang mendapatkan pelatihan diarahkan untuk melatih kelompok lain agar terjadi transfer pengetahuan di tengah terbatasnya sumber daya. Berkaitan dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Pemerintah KKU perlu menciptakan inovasi pendanaan program melalui kemitraan dengan pihak swasta (perusahaan di tingkat provinsi), pemerintah provinsi atau lembaga negara di tingkat provinsi, atau lembaga donor. Contohnya, Pemerintah KKU dapat merancang program pemberdayaan UMKM melalui kerja sama dengan bank-bank setempat, pemerintah provinsi, atau Bank Indonesia yang memiliki program pembinaan UMKM.

Upaya-upaya tersebut perlu disertai dengan pengadopsian konsep pembangunan ekonomi inklusif ke dalam perencanaan pembangunan daerah di KKU. Dengan begitu, target-target pembangunan dapat diintegrasikan untuk satu tujuan yang sama, yakni pertumbuhan ekonomi yang disertai penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi. ■

Daftar Acuan

Agenor, Pierre Richard dan Blanca Moreno-Dodson (2006) 'Public Infrastructure and Growth: New Channels and Policy Implications.' Policy Research Working Paper No. 4064. Washington, DC: World Bank <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8880>> [15 Juni 2022].

Aschauer, David Alan (1989) 'Is Public Expenditure Productive?' *Journal of Monetary Economics* 23 (2): 177–200. DOI: 10.1016/0304-3932(89)90047-0.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) 'Capaian Kemantapan Jalan Nasional'. *Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa)* <<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/1586>> [15 Agustus 2022].

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kayong Utara (KKU) (2021) 'Kabupaten Kayong Utara dalam Angka.' Kabupaten Kayong Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara.

Bappenas (2021) 'Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif'. *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* <<http://inklusif.bappenas.go.id/data>> [15 Februari 2022].

Direktorat Jenderal (Dirjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2019) 'TN Gunung Palung'. *Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* <<http://ksdae.menlhk.go.id/album/20/79.html>> [15 Juni 2022].

Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) (2020) 'Portal APBD'. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan* <<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>> [15 Juni 2022].

Grundey, Dainora (2008) 'Managing Sustainable Tourism in Lithuania: Dream or Reality?' *Technological and Economic Development* 14 (2): 118–129. DOI: 10.3846/1392-8619.2008.14.118-129.

Jackson, Emerson Abraham dan Mohamed N. Jabbie (2021) 'Import Substitution Industrialization (ISI): An Approach to Global Economic Sustainability.' Dalam *Industry, Innovation and Infrastructure*. Walter Leal Filho, Anabela Marisa Azul, Luciana Brandli, Amanda Lange Salvia, dan Tony Wall (eds.) Cham: Springer: 506–518. DOI: 10.1007/978-3-319-95873-6_116.

Kementerian Kesehatan (2021) 'Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Baru 58,4%, Kemenkes Dorong Pemda Kejar Target'. *Sehat Negeriku* <<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211130/3038902/cakupan-imunisasi-dasarlengkap-baru-584-kemenkes-dorong-pemda-kejar-target/>> [15 Juni 2022].

Martin, Will dan Devashish Mitra (2001) 'Productivity Growth and Convergence in Agriculture versus Manufacturing.' *Economic Development and Cultural Change* 49 (2): 403–422. DOI: 10.1086/452509.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) (2022) 'Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kayong Utara 2022.' Kabupaten Kayong Utara: Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Rodríguez, Francisco dan Dani Rodrik (2000) 'Trade Policy and Economic Growth: A Skeptic's Guide to the Cross-National Evidence.' *NBER Macroeconomics Annual* 15: 261–325. DOI: 10.1086/654419.

Sachs, Jeffrey D. dan Andrew Warner (1995) 'Natural Resource Abundance and Economic Growth.' Working Paper 5398. Cambridge: National Bureau of Economic Research, Inc. DOI: 10.3386/w5398.



SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Jl. Cikini Raya No. 10A,
Jakarta 10330 Indonesia

☎ 6221-3193 6336

☎ 6221-3193 0850

✉ smeru@smeru.or.id

🌐 smeru.or.id

📺 @SMERUInstitute

📍 The SMERU Research Institute

📱 @smeru.institute

The SMERU
Research Institute

Editor:
Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2022 SMERU

Untuk catatan penelitian
lainnya, silakan kunjungi
smeru.or.id.



Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Saran Sitasi:

Larasati, Wandira, Abdullah Faqih, dan M. Sulton Mawardi (2022) 'Menuju Agenda Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Kayong Utara.' Catatan Penelitian No. 3. Jakarta: The SMERU Research Institute

Untuk versi digital, tambahkan:
<URL> [tanggal akses].